

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Awal Maret 2020 Indonesia dilanda pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi serta mengakibatkan tekanan pada anggaran Negara. Dalam hal ini berbagai macam upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan dan menjalar ke semua sektor, mulai dari kesehatan, industri, pendidikan, hingga sektor ekonomi. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial serta pembatasan kegiatan masyarakat guna menekan laju penyebaran COVID-19, hal ini berdampak pada berkurangnya mobilitas masyarakat sehingga kemudian menyebabkan menurunnya produktivitas kerja yang ditandai dengan menurunnya penjualan, terjadinya kekurangan modal, dan terhambatnya proses distribusi (Rosita, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pihak yang terdampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dikarenakan menurunnya kinerja industri dalam pengolahan dan pengerjaan, mulai dari produksi barang, distribusi barang, hingga permintaan produk baru (Kemenkeu, 2020). Dalam perputaran perekonomian Indonesia, UMKM memiliki dampak yang sangat besar dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah UMKM yang mendominasi jenis usaha di Indonesia dengan presentase sejumlah 98,68%, serta pada tahun 2018 nilai peredaran usaha nasionalnya yang mencapai Rp. 8.573.895,4 milyar. Tidak hanya itu, dengan jumlah 116.978.631 tenaga kerja yang telah

terserap UMKM dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian di Indonesia (Qimyatussa'adah, dkk, 2020).

Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa. Dilihat dari potensi perekonomiannya, Provinsi Jawa Tengah merupakan jalur transit antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, serta DIY sehingga menjadikan perekonomian di Jawa Tengah menjadi maju. Penggerak ekonomi di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh UMKM. Jumlah UMKM binaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 berjumlah 147.233 unit. Jumlah ini terus mengalami peningkatan. Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 2,43% di tahun 2017 menjadi 15,49% di tahun 2019. Kenaikan jumlah unit ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah omzet dan asset yang dimiliki (Data Koperasi dan UMKM, 2020)

UMKM memiliki banyak ruang untuk berkembang, terutama dalam hal sirkulasi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Bentuk kontribusi yang diberikan UMKM mencakup pembukaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja baru, serta berperan sebagai penyangga ketika terjadi hentakan krisis perekonomian. Oleh sebab itu, demi keberlangsungan UMKM pemerintah mendorong pengembangan Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) kemudian ditujukan kepada Entitas Mikro Kecil Menengah dalam bentuk SAK EMKM. (IAI, 2016).

UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah yang paling banyak di Indonesia (Augustinah, 2019). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Laporan laba-rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang tersedia penting bagi pelaku UMKM karena didalam laporan tersebut memuat berbagai informasi yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan UMKM dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak manajerial termasuk juga sebagai salah satu syarat perbankan dalam memberikan kredit guna menambah modal usaha. Salah satu hal yang membuat

pengajuan kredit ditolak oleh pihak perbankan adalah tidak tersedianya laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pihak perbankan sangat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, selain itu pihak perbankan tidak akan mengambil resiko dengan memberikan kredit kepada usaha yang tidak memiliki laporan keuangan (Lestari, dkk, 2021).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan upaya untuk membantu UMKM agar dapat melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan agar lebih *bankable* dan lebih mudah untuk memperoleh kredit dari bank dengan mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditetapkan dan dilaksanakan terhitung sejak 1 Januari 2011. Karena banyaknya unsur laporan dalam SAK ETAP, kurangnya pemahaman pelaku UMKM, *cost* yang cukup tinggi untuk mempekerjakan akuntan profesional, maka pelaksanaan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP masih belum sepenuhnya berhasil (Atmadja, dkk, 2017). Informasi mengenai situasi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan merupakan fungsi diterapkannya laporan keuangan yang dapat digunakan oleh banyak orang untuk membuat keputusan ekonomi (Posi dan Putra, 2021).

Hasil dari penelitian Atmadja, dkk, (2017) menunjukkan bahwa SAK ETAP tidak berhasil diterapkan kepada pelaku UMKM dikarenakan proses pencatatan dan pembukuan akuntansi para pelaku UMKM yang masih terbilang sederhana. IAI memberlakukan standar baru untuk dapat mewujudkan UMKM yang lebih canggih, mandiri, modern, serta dapat mengakses sumber pendanaan industri keuangan. Terhitung sejak 1 Januari 2018, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil,

dan Menengah (SAK EMKM) resmi diterapkan. Harapannya, dengan pemberlakuan SAK EMKM pelaku UMKM dapat lebih maju dan mandiri dalam menghasilkan laporan keuangan dalam usahanya. Dalam keberhasilan usaha informasi akuntansi sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam informasi akuntansi dijadikan sebagai dasar pelaporan pajak, dan pengambilan keputusan bagi pelaku UMKM, penambahan modal usaha, dan lain-lain (Pertama dan Sutapa, 2020).

Karena dalam SAK EMKM hanya terdapat tiga komponen, penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dinilai lebih mudah diadopsi oleh UMKM dibandingkan SAK ETAP. Kecuali untuk entitas jasa keuangan, semua elemen laporan keuangan disusun hanya berdasarkan biaya perolehan, tanpa penurunan nilai yang diakui; laporan perbandingan disajikan secara wajar dengan periode terakhir; serta penyusutan yang dilakukan hanya dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa memperhatikan nilai sisa; dan fitur yang paling mencolok adalah bahwa basis akrual mengamanatkan bahwa bisnis yang sebelumnya menggunakan basis tunai mengubah catatan mereka menjadi basis akrual (IAI, 2020). Bagi pelaku UMKM lima komponen laporan keuangan dianggap terlalu berat untuk diterapkan, maka diterbitkannya SAK EMKM dimaksudkan untuk membantu UMKM menyusun laporan keuangan agar lebih mudah (Satiya, dkk, 2020).

Peneliti berharap dapat mengetahui hubungan antara pemahaman akuntansi, umur usaha, dan sosialisasi SAK EMKM dengan penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap penyusunan laporan keuangan pelaku UMKM

untuk mendukung kegiatan usahanya dengan diterbitkannya SAK EMKM oleh IAI. Dalam portal satu data KUKM (PERSADA) jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.600 pelaku UMKM (DINKOP UKM JATENG, 2022). Fenomena perkembangan UMKM di Purbalingga yang tercatat pada dinas koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dari usaha mikro menjadi usaha kecil sebanyak 23 pelaku pada tahun 2019 (Dinkominfo Pemkab Purbalingga, 2020). Dalam upaya meningkatkan kelas usaha pelaku UMKM dari usaha mikro menjadi usaha kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah dengan perluasan pemasaran melalui jaringan *platform* digital/*online*, bantuan kemasan produk, festival-festival produk UMKM dan pelatihan bagi pelaku UMKM (DINKOP UKM Purbalingga, 2020). Dalam menunjang akses permodalan, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menganggarkan subsidi pinjaman (kredit mawar) dengan bunga 0% untuk pelaku UMKM (Dinkominfo Pemkab Purbalingga, 2020). Selain itu pelaku UMKM juga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten terutama dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga agar dapat menerapkan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) untuk pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga.

Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, pemahaman akuntansi berperan sangat penting bagi pelaku UMKM. Pemahaman akuntansi adalah suatu proses dimana pelaku UMKM belajar tentang akuntansi dan dapat menerapkannya pada operasi perusahaannya. Bentuk dari pemahaman yang

dimaksudkan adalah pelaku usaha paham dan mengerti mengenai ketentuan umum dan tata cara pencatatan serta pelaporan keuangan yang benar sesuai dengan standar akuntansi SAK EMKM (Kristiana dan Santosa, 2019). Menurut SAK EMKM pelaku UMKM saat ini masih sangat minim pemahamannya mengenai pelaporan keuangan yang baik sesuai SAK EMKM (Kusuma dan Lutfiany, 2018). Para pelaku usaha mikro hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya dengan sangat sederhana, juga pemahaman akuntansi yang masih sederhana sesuai dengan tingkat pendidikannya (As'adi dan Chalimi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dan Eka (2018) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Sementara itu, penelitian Meiyudistiani (2016) dan Qimiyatussa'asah, dkk (2020) menunjukkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Sebab, meskipun pelaku UMKM telah menguasai pembukuan sesuai dengan SAK EMKM, namun hal ini tidak menjamin bahwa pelaku UMKM akan menggunakan laporan keuangan yang diterima secara luas, sementara bermuara pada pelaku UMKM akan menyusun laporan keuangan atau hanya menyimpan catatan pembukuan.

Selain itu umur usaha juga berdampak pada implementasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penerapan laporan keuangan yang baik berjalan seiring dengan semakin lama usaha UMKM berdiri. (Cahyaningrum dan Andhaniwati, 2021). Umur usaha memiliki dampak menguntungkan terhadap penerapan laporan keuangan, hal ini ditunjukkan berdasarkan penelitian Novianti (2020) dan Ainy &

Hasani (2019) yang membuktikan bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhidayanti (2019) dan Azmi & Silvia (2019) yang menunjukkan umur usaha berpengaruh negatif terhadap implementasi SAK EMKM. Dalam penelitian tersebut umur usaha tidak mempengaruhi niat pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan dengan basis SAK EMKM.

Dalam penyusunan laporan keuangan, sosialisasi SAK EMKM diharapkan dapat membuat pelaku usaha mengembangkan kualitas diri agar dapat memahami dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dengan tersedianya laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan usahanya, apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan atau penurunan dengan melihat pada laporan keuangan laba-rugi usahanya (Lohanda, 2017). Dengan tersedianya laporan keuangan perusahaan yang memadai, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan keputusan bisnis mengenai usahanya (Larasati dan Farida, 2021).

Berdasarkan penelitian Larasati & Faridha (2021) dan Badria, dkk (2018) membuktikan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Berbeda dengan penelitian Prawesti & Budiman (2017) dan Tuti & Dwijayanti (2014) menyatakan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap penerapan laporan keuangan UMKM sesuai dengan basis SAK EMKM. Peralnya, pelaku UMKM menilai bahwa sosialisasi laporan keuangan berbasis SAK EMKM terlalu sulit untuk dipahami dalam waktu yang singkat. Pelaku UMKM hanya menyimpan catatan keuangan untuk melacak

pendapatan dan pengeluaran saja, namun untuk pembukuan laporan keuangan cenderung jarang untuk diterapkan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, UMUR USAHA, DAN SOSIALISASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, TERHADAP PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK EMKM STUDI PADA PELAKU UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, masalah dapat dibingkai dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
2. Apakah Umur Usaha berpengaruh terhadap Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
3. Apakah Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah berpengaruh terhadap Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?
4. Apakah Pemahaman Akuntansi, Umur Usaha, Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Merujuk pada uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh umur usaha terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, umur usaha, sosialisasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah secara simultan terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diprediksi dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Harapan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memberikan manfaat serta meneruskan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh pemahaman akuntansi, umur usaha, dan sosialisasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terhadap penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan dapat menjadi referensi atau sumber agar dapat

dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya yang relevan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi UMKM Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga mengenai pentingnya penerapan pelaporan keuangan yang berbasis SAK EMKM.

### b. Bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya dinas yang terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DINKOP UMKM).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk bahan evaluasi mengenai pemahaman dan sosialisasi penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kabupaten Purbalingga.

## 1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yang disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

## BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

## BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V : Penutup

Sebagai bab akhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat mengenai apa yang diperoleh dalam pembahasan. Serta juga memuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.